

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Berbagai isu internasional terdesak ke belakang oleh krisis Lebanon. Bahkan tergeser perhatian atas konflik Israel-Palestina sebagai latar belakang krisis Lebanon. Masyarakat internasional memang dibuat terperangah dan terpana atas kekejian serangan Israel atas Lebanon sejak tanggal 12 Juli lalu. Dunia, minus Pemerintah Amerika Serikat, mengecam keras dan menyatakan kekusaran atas serangan Israel. Begitu hebat dampak gempuran Israel, perhatian dunia terhadap sejumlah persoalan pelik, seperti konflik di Sri Lanka, kekacauan di Somalia, isu nuklir Korea Utara dan Iran, maupun isu terorisme, menjadi surut ke belakang, sekurang-kurangnya untuk sementara.

Kasus Lebanon memang menghadirkan berbagai dimensi persoalan hukum dan kemanusiaan yang mengentakkan dan membuat berbagai kalangan di dunia terperangah. Serangan Israel tidak hanya melanggar dan melecehkan kedaulatan Lebanon sebagai negara merdeka, tetapi benar-benar menimbulkan tragedi kemanusiaan. Ratusan orang, kebanyakan warga sipil, menjadi korban tewas. Berbagai infrastruktur porak poranda. Padahal Lebanon baru berusaha bangkit dari reruntuhan perang saudara pada periode 1975 – 1990 yang dipicu oleh perebutan kekuasaan antara kelompok Kristen Maronite, dengan Islam (Sunni, Syiah dan Sekte Druze). Lebih memprihatinkan lagi, Pemerintah Lebanon tidak

bisa berbuat apa-apa ketika kedaulatan negara dan bangsanya dilanggar dan dilecehkan Israel.

Perasaan tidak berdaya itu tampaknya juga menghinggapi masyarakat internasional karena tidak mampu menghentikan kebrutalan serangan Israel. Gempuran Israel terus berlanjut meski mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional. Aksi protes dan demonstrasi pecah di berbagai kota di dunia, termasuk Indonesia, mengecam Israel dan Amerika Serikat. Komunitas dunia tentu saja menjadi frustrasi karena Israel tidak peka terhadap suara masyarakat internasional. Namun kekecewaan terbesar ditunjukkan kepada AS, yang dianggap sebagai kekuatan paling menentukan di balik serangan Israel.

Sekiranya AS bersikap netral dan mendorong gencatan senjata, Israel dipastikan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, AS yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Israel dalam menggempur basis Hezbollah di Lebanon, malah semakin membuat Israel berada di atas angin. Bahkan AS mempercepat pengiriman amunisi dan senjata kepada Israel. Dunia sesungguhnya sedang ditantang, apakah mampu menyelesaikan krisis Lebanon. Kegagalan meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya terhadap Lebanon akan menimbulkan kekecewaan berat, yang berdampak negatif bagi upaya menciptakan tatanan dunia baru yang adil dan damai¹.

Serangan 34 hari (12 Juli – 14 Agustus 2006) yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon, juga telah membuat pemerintahan Lebanon menjadi labil. Serangan Israel terhadap Lebanon yang bertubi-tubi tersebut menghancurkan berbagai

¹ *Kompas*, 7 Agustus 2006.

infrastruktur penting bagi Lebanon, baik gedung-gedung pemerintahan maupun bangunan pemukiman penduduk, yang hancur akibat serangan bom Israel yang memang sengaja ditujukan untuk menggempur pasukan Hezbollah (yang telah menculik dua orang pasukan Israel dan membunuh delapan orang lainnya).

Berbagai krisis yang terjadi di Lebanon, baik dari masalah dalam negeri yaitu perang saudara, maupun masalah luar negeri negara Lebanon yang berasal dari negara-negara Arab telah menimbulkan ancaman yang serius bagi kedaulatan negara Lebanon. Selain itu, serangan-serangan Israel terhadap Lebanon, yang mengakibatkan kerusakan parah pada beberapa fasilitas umum di Lebanon, serta mengancam kehidupan warga Negara Lebanon, membuat kedaulatan Negara ini terancam. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai ancaman kedaulatan negara Lebanon yang timbul akibat krisis politik yang dihadapi Lebanon dan juga sebagai akibat dari agresi Israel terhadap Lebanon melalui skripsi yang berjudul:

“PENGARUH INTERVENSI ASING TERHADAP KEDAULATAN NEGARA” Studi Kasus: Dampak Agresi Israel 2006 Terhadap Kedaulatan Negara Lebanon.

B. Latar Belakang Masalah

Lebanon pernah dijuluki sebagai Swiss di Timur Tengah, dengan perbukitan yang indah, kaya dan penduduk multikultural yang hidup harmonis. Namun, keindahan negeri itu telah rusak oleh perang sipil yang berlangsung 14 tahun dengan korban lebih dari seratus ribu jiwa tewas dan luka. Ketika negeri ini

berusaha membangun diri dari puing-puing kehancuran, bangunan itu kini dihancurkan oleh mesin perang zionis dalam pertempuran yang amat timpang. Perang yang tidak lagi memandang batas-batas kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, serta tidak memandang kedaulatan sebuah negara merdeka seperti Lebanon, yang berhak mempertahankan kedaulatan negaranya dari ancaman luar. Tetapi pada kenyataannya, kedaulatan Lebanon dengan mudah dicabik-cabik oleh gempuran yang dilakukan Israel secara bertubi-tubi.

Ketika pemerintahan Ottoman berakhir, Konferensi San Remo di Italia pada tahun 1920 memutuskan memberi mandat kepada Perancis untuk memegang pemerintahan di Lebanon dan Suriah. Selama memerintah Lebanon, Perancis mempunyai niat baik terhadap negara ini dan menyerahkan kepemimpinan negara menurut kehendak rakyat sehingga mayoritas orang Lebanon menerima Lebanon sebagai mandataris Perancis. Bahkan mereka menuntut agar Lebanon dipisahkan dari Suriah sehingga dapat berdiri sendiri. Meski orang-orang Lebanon di bawah mandataris Perancis mendapatkan kebebasan namun kebebasan penuh baru dapat dinikmati setelah tentara Perancis yang paling terakhir meninggalkan negeri ini pada tahun 1946 (walaupun Lebanon merdeka tanggal 22 Nopember 1943).

Berbeda dari kebanyakan Negara Timur Tengah, yang penduduknya relatif homogen, Lebanon menyerupai sebuah bangunan dengan sebuah bom waktu yang berdetik-detik didalamnya. Setelah meraih kemerdekaan dari Perancis, bangsa Lebanon terdiri dari dua kelompok utama agama, yaitu: Muslim (Sunni dan

Syiah), dan Kristen (Maronit dan Ortodoks)². Negara Lebanon pada periode 1975 – 1990 dilanda perang saudara yang dipicu oleh perebutan kekuasaan antara kelompok Kristen Maronite, dengan Islam (Sunni, Syiah dan Sekte Druze). Perang saudara pada tahun 1975 adalah perang saudara yang terjadi untuk kedua kalinya sejak kemerdekaan Lebanon. Perang saudara yang pertama kali terjadi pada bulan Juli 1958, sebagai akibat dari perbedaan pendapat antara golongan Muslim dan golongan Kristen mengenai kebijaksanaan politik pemerintah dan pembagian kekuasaan antar golongan yang tidak dapat diatasi.

Pada bulan Januari 1975, di Beirut didirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penangkapan ikan laut. Direktur perusahaan tersebut Camille Shamun, bekas presiden Lebanon, atas permintaan perusahaan, pemerintah memberikan monopoli penangkapan ikan laut sepanjang pesisir pantai Lebanon kepada mereka. Kejadian ini menimbulkan reaksi keras dari nelayan di Lebanon Selatan, yang kebanyakan dari mereka adalah golongan Muslim. Pemogokan dan demonstrasi melanda kota Sidon. (sebuah kota pelabuhan nelayan di Lebanon Selatan). Pada saat itu pemerintah segera mengirimkan tentara untuk memadamkan huru-hara tersebut. Dalam bentrokan antara tentara dan demonstran beberapa orang demonstran tewas, termasuk seorang bekas anggota Parlemen Lebanon. insiden ini kemudian disebut *Proteine Affair* yang kemudian mengawali pecahnya perang saudara 1975³.

² Zulkifly Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 259.

³ Davis Waines, *Civil War in Lebanon, the Anatomy of Crisis*, International Perspective, No.24 January-February 1976. hal. 17.

Berdasarkan permintaan Pemerintah Lebanon saat itu dan mandat dari Liga Arab, Pasukan Suriah memasuki Lebanon pada tahun 1976 dalam upaya memulihkan perdamaian. Perang itu juga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk Lebanon yang hijrah ke luar negeri yang diperkirakan saat ini mencapai 14 juta jiwa yang hidup di berbagai negara, terutama di Amerika Selatan. Sementara penduduk Lebanon yang hidup dalam negeri saat ini di perkirakan hanya mencapai 3,5 juta jiwa.

Kehadiran orang-orang Palestina yang kebanyakan terdiri dari pemeluk agama Islam merubah perimbangan kekuatan Islam dan Kristen. Keadaan ini semakin menguntungkan golongan Muslim ketika orang-orang Palestina dan kelompok gerilyanya mengadakan perpindahan besar-besaran dari Yordania ke Lebanon pada tahun 1972. orang-orang Palestina inilah yang kemudian menjadi pendukung utama perjuangan golongan Muslim menentang Kristen, dan bahkan mereka inilah yang memiliki sumbangan paling besar terhadap lahirnya milisi Muslim yang kemudian menjadi tulang punggung kekuatan militer golongan tersebut.

Dalam percaturan politik internasional Negara-negara Arab berperan sebagai pendukung perjuangan rakyat Palestina meskipun dengan cara-cara yang berbeda-beda. Sedangkan Lebanon sesudah tahun 1972 merupakan basis gerilya Palestina yang paling besar. Oleh karena itu kehadiran orang-orang Palestina di Lebanon selalu dilindungi dan dipertahankan oleh Negara-negara Arab disetiap forum internasional. Di Lebanon, gerilya Palestina selalu berusaha untuk bekerjasama dengan golongan Muslim. Demikian kuat kerjasama tersebut,

sehingga gerilya Palestina seakan-akan menyatu dengan golongan Muslim Lebanon. Di sisi lain, kehadiran orang-orang Palestina di Lebanon merupakan masalah yang cukup menyulitkan pemerintah setempat yang ternyata tidak mampu mencari jalan keluar yang tepat dan tuntas. Sehingga masalah ini menjadi persoalan yang berlarut-larut. Apalagi setelah orang-orang Palestina terlibat dalam perang saudara 1975 sebagai pokok dan sekaligus pihak dalam perang saudara tersebut. Dengan adanya orang-orang Palestina di dalam tubuh Lebanon ini, merupakan salah satu bukti nyata bahwa kehadiran pihak-pihak asing di Lebanon telah memunculkan permasalahan baru yang lebih lanjut akan mengancam keadaan dalam negeri Negara Lebanon.

Pada tanggal 22 Oktober 1989 semua wakil-wakil kekuatan politik, partai dan sekte keagamaan sepakat mengadakan rekonsiliasi nasional yang dikenal dengan "*Taif Agreement*" di bawah sponsor Saudi Arabia dan Suriah, yang mengakhiri perang saudara tersebut. Kehidupan berpolitik dan bernegara mulai diatur dengan formulasi baru berdasarkan konstitusi yang mengalami perubahan yang disepakati dalam rekonsiliasi nasional tersebut. Taif Agreement adalah reformasi di bidang politik dengan menentukan konsep Troika yang membagi kepemimpinan nasional ke dalam 3 kelompok yaitu Kristen Maronite – Presiden, Islam Sunni – Perdana Menteri dan Islam Syiah – Ketua Parlemen. Taif Agreement berhasil mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 15 tahun, dan secara resmi telah diterapkan menjadi Undang-Undang oleh Parlemen⁴.

⁴ *Lebanon The World Fact Book*, online (<http://www.cia.gov/theworldfactbook/Lebanon>). Diakses tanggal 24 Agustus 2006 pukul 14.56 WIB.

Meskipun Perjanjian Taif juga menyebutkan bahwa Suriah akan menarik pasukannya dari Lebanon, tetapi sampai dengan awal Maret 2005 masih terdapat sekitar 14.000 pasukan Suriah di Lebanon dari jumlah semula yang mencapai 40.000 orang. Sejak tahun 2000 Suriah telah menarik secara bertahap 26.000 pasukannya. Menyusul adanya kecurigaan campur tangan Suriah dalam perubahan konstitusi Lebanon yang memperpanjang masa jabatan Presiden Emile Lahoud. Menyikapi permasalahan tersebut, maka pada tanggal 2 September 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1559 yang meminta semua pasukan asing untuk keluar dari Lebanon.

Permasalahan Lebanon Selatan, yang sejak 1978 diduduki Israel, merupakan isu politik sentral yang menjadi perhatian pemerintah dan rakyat dalam dua dekade terakhir ini. Hal tersebut wajar karena seluruh sektor kehidupan, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya selalu dipengaruhi oleh situasi di kawasan tersebut. Eskalasi militer harian misalnya, sangat berpengaruh pada politik dalam dan luar negeri Lebanon. Demikian pula dengan situasi perekonomian, sosial budaya dan keamanan.

Upaya dewan keamanan PBB untuk menarik mundur semua kekuatan asing yang masih berada di Lebanon dirasakan cukup efektif untuk meredam intervensi pihak asing yang terlalu berlebihan terhadap kepentingan politik Lebanon. Akan tetapi dengan kehadiran Israel melalui agresinya di Lebanon, secara otomatis, Israel kembali hadir dalam upayanya melakukan campur tangan kepada pemerintah Lebanon. Agresi Israel yang dimulai sejak tanggal 12 Juli 2006 ini berawal dari penculikan dua tentara Israel-Ehud Goldwasser dan Eldad

Regev-di perbatasan Israel-Lebanon oleh pejuang Hezbollah. Hal inilah yang kemudian memicu agresi Israel terhadap kekuatan Hezbollah yang berada di Lebanon tersebut.

Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Lebanon menjadi agenda utama dalam agresi Israel kali ini. Menurut salah satu sumber militer Israel, Israel telah memerintahkan sedikitnya 3.000 tentara cadangan untuk bersiap melakukan serangan darat ke Lebanon selatan. Israel telah mengumpulkan tentara, tank dan artileri di dekat perbatasan dengan Lebanon sejak krisis dengan Hezbollah meletus 12 Juli 2006 lalu. Negara itu masih memerlukan beberapa hari sebelum tentara cadangan baru dimobilisasi. Satu kemungkinannya adalah bahwa mereka akan dikirim ke Tepi Barat yang diduduki untuk membantu pasukan tempur, yang kemudian akan dikirim ke utara (ke Lebanon). Israel, yang memiliki tentara wajib militer, telah siap memanggil tentara cadangan sejak negara itu melancarkan serangan besar terhadap Hezbollah di Lebanon setelah kelompok tersebut menculik dua tentara Israel dan membunuh delapan orang yang lain dalam satu serangan lintas perbatasan⁵.

Agresi Israel telah menghancurkan fasilitas-fasilitas umum yang selama ini mendukung kehidupan warga Lebanon. Serangan Israel ini, juga telah menimbulkan sejumlah korban jiwa (baik dari kalangan sipil ataupun militer). Selain itu serangan Israel juga merusak sarana-sarana publik seperti jalan raya,

⁵http://www.wawasandigital.com/indexCAT.php?subaction=showfull&id=1153566867&archive=&start_from=&ucat=3&category=3. Diakses tanggal 20 Februari 2007, pukul 12.24 WIB.

gedung-gedung perkantoran dan pertokoan, jembatan, serta wilayah pemukiman warga di desa-desa di Lebanon⁶.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang dapat dikemukakan disini yaitu:

“ Bagaimana agresi Israel di Lebanon berdampak terhadap kedaulatan Negara Lebanon? “.

D. Kerangka Berpikir

1. Konsep Kedaulatan

Pada dasarnya kedaulatan belum memiliki batasan yang jelas dan masih menjadi pro-kontra. Salah satu definisi kedaulatan menyebutkan bahwa “Hak negara untuk melaksanakan kekuasaan penuh atas status kemerdekaannya tanpa boleh ada campur tangan pihak lain terhadap masalah internal dan eksternal. Setiap negara bebas membuat keputusannya sendiri namun kedaulatan tidak berarti bahwa negara memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak sebab hubungan antar negara diatur oleh hukum internasional”⁷.

Definisi lain mengenai kedaulatan menurut PBB tahun 1970 adalah “Tidak ada negara ataupun kelompok negara yang berhak ikut campur secara langsung maupun tidak langsung, apapun alasannya dalam hubungan dalam maupun luar negeri dengan negara lain”.

⁶ *Kompas*, 15 Juli 2006.

⁷ B. N Marbun, S. H, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 313.

Konsep modern tentang kedaulatan untuk pertama kalinya dirumuskan pada bagian terakhir abad keenam belas dengan menunjuk pada fenomena baru Negara territorial. Konsep tersebut menunjuk pada fakta politik mendasar abad tersebut, yaitu munculnya kekuasaan terpusat yang menggunakan pembuatan dan pelaksanaan hukum di dalam wilayah tertentu⁸. Doktrin kedaulatan telah mengangkat fakta-fakta politik ini kedalam teori berdasarkan hukum dan dengan demikian memberikan pembenaran moral dan citra keharusan hukum. Di dalam konsep kedaulatan rakyat, doktrin itu diberikan kepada Negara demokrasi nasional sebagai senjata politik paling ampuh⁹. Dalam pembicaraan mengenai kedaulatan di bidang pelaksanaan hukum, dua situasi harus dibedakan. Kedaulatan bangsa sebagai badan pelaksana hukum serupa dengan kedaulatan di bidang pengadilan; yaitu, keputusan terakhirnya mengenai apakah dan bagaimanakah melibatkan diri dalam tindakan pelaksanaan hukum terletak pada masing-masing bangsa.

Di lain pihak, kedaulatan bangsa sebagai sasaran yang dituju dari tindakan pelaksanaan hukum penjabarannya adalah di dalam apa yang disebut "tidak dapat dimasuki"-nya bangsa yang bersangkutan. Ini adalah cara lainnya untuk mengatakan bahwa pada suatu wilayah tertentu hanya ada satu bangsa yang mempunyai kedaulatan (kekuasaan tertinggi) dan tidak ada satu Negara lainpun yang berhak menjalankan tindak pemerintahan di wilayahnya tanpa kesediaannya. Akibatnya semua tindakan pelaksanaan yang disediakan hukum internasional, yang bukan perang, terbatas pada pengenaan tekanan pada pemerintah yang

⁸ Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson; penerjemah, A. M. Fatwan, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990. hal.201.

⁹ *Ibid.*, hal. 202.

bandel (seperti protes-protes diplomatik, intervensi, pembalasan dan blokade), yang semuanya itu membiarkan dalam keadaan utuh kedaulatan teritorial bangsa pelanggar hukum¹⁰.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada Negara untuk membuat undang-undang dengan semua cara yang akan dipakai¹¹. Kedaulatan mempunyai dua segi, yaitu¹²: segi kedalam berupa kekuasaan dalam arti kekuasaan tertinggi dari Negara terhadap semua orang, semua golongan, semua organisasi dalam Negara. Kedaulatan kedalam ini adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu Negara di dalam batas-batas wilayah kekuasaannya. Kedaulatan ke dalam juga berarti kekuasaan tertinggi dari Negara terhadap rakyatnya (penduduknya) dan semua macam bentuk-bentuk organisasi mereka di dalam daerah yurisdiksi Negara. Dalam hal demikian, maka Negara dapat memaksakan *power*-nya terhadap semua organisasi, badan individu yang berada dalam batas wilayahnya, agar mentaati peraturan dan undang-undangnya.

Sedangkan segi kedaulatan keluar, dalam arti ini ada yang menyebut dengan "kemerdekaan" karena di sini tersimpul pengertian bahwa Negara bebas dari penguasaan oleh Negara lain¹³.

2. Intervensi Asing

Pengertian Intervensi mengarah pada hal pemaksaan seperti yang dikemukakan oleh Jack C Plano dan Roy Olton adalah campur tangan secara

¹⁰ Ibid., hal. 204.

¹¹ Drs. Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 68.

¹² Ibid.

¹³ Ibid., hal. 69.

paksa yang dilakukan oleh satu negara atau beberapa negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan maksud untuk mempengaruhi kebijaksanaan politik dalam atau luar negeri dari negara yang diintervensi¹⁴.

Suatu negara dapat melakukan intervensi terhadap negara lain dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu¹⁵:

- a) Diminta atau diundang oleh penguasa negara tersebut karena merasa terancam kedudukannya.
- b) Diundang oleh partai oposisi atau pemberontak untuk menggulingkan pemerintah yang sah.
- c) Sebagai tamu tak diundang.

Keadaan modern yang kemudian mendorong terjadinya intervensi satu Negara terhadap Negara lain adalah serbagai berikut: *Pertama*, semua Negara besar (dan beberapa Negara yang lebih kecil juga) telah menambahkan pada teknik-teknik perundingan diplomatik tradisional mereka, program luas bantuan militer dan ekonomi. Kebanyakan dari program ini, baik yang dijalankan oleh satu Negara atau oleh organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial dalam negeri Negara-negara penerima. Seiring perkembangan ekonomi tidak dapat dicapai apabila pembaharuan politik yang penting tidak dilaksanakan. Hal ini mungkin membutuhkan tekanan-tekanan diplomatik (dengan ancaman untuk menahan

¹⁴ Jack C Plano & Roy Plano, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston Inc, 1969, hal. 62.

¹⁵ Ibid.

imbalan ekonomi), yang jelas merupakan campur tangan terhadap masalah dalam negeri Negara penerima¹⁶.

Kedua, terdapat banyak ketidaksesuaian antara batas Negara di satu pihak, dan batas wilayah suku, keagamaan, atau kebahasaan di lain pihak. Banyak Negara sekarang ini hanya memiliki kelangsungan hidup bersyarat; artinya, Negara itu dapat hidup hanya dengan dukungan minimal dari semua kelompok dalam batas wilayah mereka. Jika ada perpecahan sosial yang dalam, dan beberapa kelompok dalam masyarakat merasa tertindas, kemungkinan kekacauan sipil meningkat. Jika kelompok-kelompok minoritas ini merupakan suatu strategis yang membutuhkan tindakan politik yang diorganisasi dengan sangat baik atau keras, mereka condong memerlukan dukungan dari luar¹⁷.

Ketiga, loyalitas politik, yang secara tradisional telah meluas ke lembaga-lembaga politik atau para penguasa, apakah hukum, suku, bangsa, atau kekaisaran, kadang-kadang malah diarahkan ke badan-badan atau ideologi politik luar negeri. Ciri politik yang modern ini tentu saja membuka peluang bagi Negara-negara asing, yang melambangkan ideologi transnasional ini, untuk menjadi terlibat dalam politik dalam negeri bangsa lain. *Keempat*, jalan buntu nuklir sekarang ini telah terang-terangan memaksa para musuh utama perang dingin masuk ke sektor peperangan dan subversi yang tidak teratur, dimana kemungkinan peningkatan militer yang tidak terkendali kecil sekali. *Kelima*, pemerintah dengan tujuan luar revolusioner biasanya cenderung menggunakan untuk tujuan luar negeri jenis-

¹⁶ K. J. Holsty, *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta, 1998, hal.4.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 5.

jenis teknik yang sama dengan teknik yang telah berhasil digunakan pemimpin mereka dalam memperoleh kekuasaan dalam negeri¹⁸.

Suatu negara yang mempunyai potensi yang besar akan terjadinya konflik kesukuan, keagamaan, ekonomi, atau ideologi dalam masyarakat, semakin besar kemungkinan bahwa suatu pemerintahan luar akan melakukan intervensi untuk melayani kepentingan-kepentingannya sendiri. Menurut K. J. Holsti, intervensi dikategorikan menjadi lima bentuk sebagai berikut¹⁹:

a) Tindakan politik Rahasia

Tindakan untuk mempengaruhi kondisi politik negara lain dengan melalui cara-cara yang tersembunyi, yaitu melalui propaganda tersembunyi.

b) Demonstrasi kekuatan

Memperlihatkan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan, baik untuk membantu maupun menghalangi pemberontakan dalam negeri sebuah negara asing²⁰.

c) Subversi

Mendukung, mengatur dan mengarahkan suatu potensi pemberontakan di dalam negeri sebuah negara asing. Teknik subversi modern dapat dilukiskan dengan menggambarkan secara ringkas bagaimana Jerman Nazi, Uni Soviet, dan Amerika Serikat telah menyusun daftar dan membantu unsur-unsur yang tidak setuju di berbagai Negara

¹⁸ Ibid., hal. 6.

¹⁹ K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* : Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 9-26.

²⁰ Holsti, *op.cit.*, hal.11.

asing untuk menggulingkan rejim yang berkuasa atau membuka jalan bagi suatu serangan militer seketika atas Negara sasaran²¹.

d) Perang Gerilya

Yaitu sebuah jenis kegiatan revolusioner yang menggabungkan teror dengan serangan-serangan gerilya yang berpindah-pindah. Unit-unit gerilya, misalnya, tidak menunggu suatu "situasi revolusioner" berkembang sebelum mereka memulai serangan langsung terhadap Negara dan masyarakat²².

e) Intervensi Militer

Suatu bentuk intervensi yang menentukan adalah pengiriman sejumlah besar pasukan, baik untuk memantapkan suatu rezim terhadap para pemberontak atau membantu para pemberontak menggulingkan suatu perangkat penguasa yang telah mantap. Lebih sering, intervensi militer merupakan suatu akibat dari kemelut; kemudian pasukan-pasukan dikirim dengan cepat²³.

Menurut K. J. Holsti, tujuan suatu negara untuk melakukan intervensi dibagi menjadi enam macam²⁴, Yaitu:

- a) Konflik Wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada kepemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat wilayah negara lain.

²¹ Ibid., hal. 12.

²² Holsti, *op.cit.*, hal. 23.

²³ Ibid, hal. 25.

²⁴ K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* : Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 173-174.

- b) Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah, tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat, maksudnya adalah menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang melakukan intervensi.
- c) Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang relative kecil menjadi suatu krisis penuh.
- d) Imperialisme Regional, dimana suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan, dan perdagangan.
- e) Konflik Pembebasan, atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain, biasanya karena alasan-alasan etnis atau ideologis.
- f) Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah.

Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan hukum tertinggi dari bangsa yang membuat dan melaksanakan hukum di dalam wilayah tertentu dan, sebagai akibatnya, bangsa tersebut bebas dari kekuasaan bangsa lain, maka dari itu, bangsa kehilangan kedaulatannya apabila ditempatkan di bawah kekuasaan bangsa lain, sehingga bangsa yang terakhir inilah yang menjalankan kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan hukum di dalam wilayah bangsa yang

dikuasainya itu. Cara lain dimana kedaulatan sebuah Negara dapat hilang adalah dengan memasuki wilayah bangsa tersebut.

Melalui agresinya, Israel masuk ke wilayah Lebanon dengan cara mengerahkan pasukannya, pengiriman sejumlah pasukan Israel ke wilayah Lebanon, dimaksudkan agar kekuatan pasukan Hezbollah di Lebanon terdesak mundur dan semakin sulit untuk menyerang balik Israel. Agresi Israel ini kemudian termasuk kedalam bentuk intervensi tidak diundang, karena kehadiran Israel di Lebanon merupakan inisiatif pihak Israel sendiri untuk membebaskan tentaranya yang ditahan oleh pasukan Hezbollah di Lebanon. Selain itu, Israel juga berusaha menghancurkan kemerdekaan Negara Lebanon, dengan cara melakukan serangan secara serampangan.

Serangan-serangan tersebut adalah sebuah cara bagi Israel untuk menunjukkan kepada Lebanon, bahwa kekuatan Israel dapat dengan mudah menembus wilayah Lebanon, baik dari darat, laut maupun udara. Sehingga tindakan Israel itu kemudian diartikan sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan Negara Lebanon, baik dari segi kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar. Karena Israel juga melakukan serangan-serangan tersebut dengan tujuan untuk dapat menguasai Lebanon²⁵.

Berdasarkan pada pengertian kedaulatan seperti yang telah disebutkan diatas, selama terjadinya agresi Israel (12 Juli- 14 Juli 2006), Lebanon menjadi sebuah Negara yang terancam kedaulatannya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana serangan Israel menghancurkan sarana-sarana umum, seperti

²⁵ Ibid.

pemukiman warga sipil, bangunan sekolah, jembatan-jembatan, pom bensin, dan fasilitas lainnya²⁶, yang sangat dibutuhkan oleh warga Lebanon. Sehingga warga Lebanon menjadi kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan juga harta bendanya. Dalam hal ini, Israel telah mengganggu kedaulatan Lebanon dengan mengancam kehidupan warga Lebanon melalui serangan-serangannya.

Sebagai aplikasi terancamnya kedaulatan suatu bangsa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kedaulatan Lebanon akan terancam ketika agresi Israel berhasil melumpuhkan pemerintahan Lebanon, menduduki wilayah Lebanon dan menguasai rakyatnya. Melalui langkah ini, Israel mengharapkan kekalahan Lebanon sehingga Israel akan dapat menempatkan kekuasaannya diatas kekuasaan pemerintah Lebanon. Israel berkeinginan untuk dapat kembali menduduki Lebanon, karena dengan menduduki Lebanon, Israel dapat memperluas wilayah kekuasaannya.

Intervensi Israel melalui agresi ini bertujuan untuk memasuki wilayah Lebanon secara paksa. Dengan hadirnya Israel di Lebanon, hal ini tentu mempengaruhi kestabilan politik Lebanon, sehingga kemungkinan akan bergolaknya kembali keadaan perpolitikan di Lebanon menjadi sangat mungkin terjadi. Gangguan yang diakibatkan oleh agresi Israel, yang kemudian berimbas pada kehidupan warga Lebanon, pemerintahan Lebanon dan juga kekhawatiran akan pendudukan kembali beberapa wilayah di Lebanon oleh Israel, mengakibatkan timbulnya ancaman terhadap kedaulatan Negara Lebanon.

²⁶ <http://sinaimesir.com/?pilih=lihat&id=448>. diakses tanggal 18 September 2006, pukul 20.19 WIB.

Dalam kasus agresi Israel ke Lebanon, intervensi pihak asing lebih condong pada tujuan imperialisme regional, dimana Israel berusaha menghancurkan kedaulatan Lebanon melalui cara-cara yang menurut pihak-pihak itu adalah lebih efektif. Mulai dari cara-cara yang halus, yaitu dengan melakukan intervensi terhadap kebijakan politik dalam negeri Lebanon sampai dengan melakukan intervensi secara terbuka, yaitu dengan agresi.

E. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka pemikiran yang diterapkan maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut :

Agresi Israel mengancam kedaulatan negara Lebanon.

F. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang penulis susun adalah penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penulisan data sekunder yaitu dengan melakukan "*library research*" atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur - literatur, buku-buku, jurnal, buletin, artikel, surat kabar, majalah dan informasi yang didapat dari internet.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membatasi fokus penulisan yang dimulai pada saat terjadinya perang saudara di Lebanon, kemudian Suriah yang membantu Lebanon untuk menyelesaikan masalah perang saudara tersebut, sampai

menjelang terjadinya agresi 34 hari yang dilakukan Israel terhadap Lebanon hingga proses penyelesaian masalah tersebut, terutama berkaitan dengan intervensi negara asing di Lebanon setelah negara tersebut mendapatkan gempuran hebat dari agresi Israel.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membatasi dalam bab - bab yang akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada :

BAB I, merupakan Pendahuluan yang berisikan : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Tehnik Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, merupakan Pembahasan yang berisikan sejarah negara Lebanon, dan tentang pemerintahan Lebanon sebelum terjadinya agresi Israel. Dimulai dari Perang Saudara, masuknya Suriah ke Lebanon, hingga menjelang Israel melakukan agresi.

BAB III, merupakan Pembahasan terjadinya Agresi Israel selama 34 hari yang dimulai sejak tanggal 12 Juli 2006, yang merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap pemerintah Lebanon.

BAB IV, merupakan Pembahasan yang berisikan mengenai kondisi pemerintahan Lebanon setelah terjadinya agresi Israel, dimana agresi tersebut menjadi ancaman kedaulatan bagi Lebanon.

BAB V, merupakan Kesimpulan.